

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim yang merupakan dampak dari pemanasan global diakibatkan karena tingginya konsentrasi gas Karbon Dioksida (CO_2). Keberadaan kawasan hutan dalam mengurangi emisi gas CO_2 memegang peranan penting dalam mengurangi dampak dari pemanasan global. Lokasi Indonesia yang terletak pada daerah tropis menjadikan Indonesia memiliki keragaman jenis vegetasi yang sangat tinggi. Selain itu iklim tropis juga menjadikan Indonesia memiliki kawasan hutan terbesar ke-2 di dunia. Hal ini merupakan sebuah keuntungan dimana kawasan hutan yang dimiliki Indonesia merupakan lokasi simpanan karbon terbesar. Guna memaksimalkan potensi kawasan hutan sebagai simpanan karbon, tentunya diperlukan berbagai bentuk upaya pengelolaan yang tepat. Berbagai peraturan/kebijakan mengenai pengelolaan hutan di Indonesia yang kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim merupakan hasil ratifikasi dari kesepakatan internasional yang salah satunya merupakan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan upaya-upaya yang disepakati guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan (Brown et al. 2001), implementasi Protokol Kyoto selama kurun waktu 2008-2012 dalam memperlambat laju deforestasi dapat mengamankan simpanan karbon sebesar 260 juta ton C. Selain itu, menurut Read & May (2001), dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta dengan memperlambat laju deforestasi, diperkirakan dapat meningkatkan cadangan karbon sampai dengan 2 miliar ton karbon per tahun pada tahun 2050.

Hutan merupakan salah satu kawasan yang dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari manfaat ekologi, ekonomi, sosial, hingga budaya. Salah satu manfaat hutan secara ekologi yaitu dapat menyerap CO_2 melalui proses fotosintesis yang menjadikan hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap CO_2 dalam jumlah/skala yang sangat besar. Indonesia merupakan

negara tropis yang menjadikannya sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas tutupan kawasan hutan sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Luas Tutupan Lahan Di Kawasan Hutan Dan Di Area Penggunaan Lain

Tutupan Lahan	Kawasan Hutan (juta ha)							APL	Jumlah	%
	Hutan Tetap					HPK	Total			
	HK	HL	HPT	HP	Total					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=1+2+4+4)					
A. Hutan	17,4	24,0	21,4	17,8	80,6	6,3	86,9	7,2	94,1	50,1
Hutan Primer	12,5	15,9	9,8	4,7	42,7	2,5	54,3	1,5	48,8	24,9
Hutan Sekunder	4,8	7,8	11,3	9,7	33,6	3,7	37,3	4,9	42,2	22,5
Hutan Tanaman	0,1	0,3	0,4	3,5	4,3	0	4,3	0,8	5,1	2,7
B. Tidak Berhutan	4,5	5,6	5,4	11,4	26,8	6,5	33,4	60,3	93,6	49,9
Total Luas Daratan	21,9	29,6	26,8	29,2	107,4	12,8	120,3	67,5	187,6	100,0
% Luas Hutan	79,6	81,0	80,0	61,0	75,0	49,1	72,2	10,7	50,1	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020

Keterangan:

HK: Hutan Konservasi

HL: Hutan Lindung

HP: Hutan Produksi Tetap

HPK: Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

APL: Area Penggunaan Lain/Arela Tidak Berhutan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total luas kawasan hutan terbesar yaitu seluas 94,1 juta hektar dengan luas hutan terbesar yaitu terdapat pada kawasan hutan lindung sebesar 24,0 juta hektar, hutan produksi terbatas sebesar 21,4 juta hektar, hutan konservasi sebesar 17,4 juta hektar, hutan produksi tetap seluas 17,8 juta hektar, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7,2 juta hektar, dan areal penggunaan lain seluas 7,2 juta hektar.

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu seluas 2.437.087,6 Ha yang terdiri dari Hutan Produksi seluas 1.418.833 Ha (58,2%), Hutan Produksi Terbatas seluas 380.931,2 Ha (15,6%) dan Hutan Lindung seluas 637.323,5 Ha (26,2%) (Perhutani 2021). Menurut Ekawati (et al., 2015) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan di Pulau Jawa sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani yang meliputi pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,

penelitian dan pengembangan, serta kegiatan usaha lain seperti agrobisnis, pariwisata, dan rest area. Adapun bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani diantaranya dalam bentuk hutan produksi, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, serta dapat melalui mekanisme kerjasama dengan instansi lain dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Sesuai dengan namanya, tujuan KHDTK yaitu untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta untuk tujuan religi dan budaya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 438 Ayat (1) bahwa KHDTK ditetapkan untuk kepentingan: a) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; b) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; atau c) Religi dan Budaya Setempat

KHDTK Wanadipa merupakan hutan pendidikan yang dikelola oleh Universitas Diponegoro yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 339/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan luas sebesar 99,65 Ha. KHDTK Wanadipa sebelumnya dimiliki oleh Perum Perhutani, yang dikelola oleh KPH Semarang melalui BKPH Penggaron. Adapun KHDTK Wanadipa memiliki luas sebesar 99,65 Hektar. Kondisi eksisting yang terdapat di sekitar lokasi KHDTK Wanadipa sudah terdapat permukiman warga serta melakukan kegiatan pertanian yang merupakan pesanggem yang sudah melakukan aktivitas pertaniannya secara turun-temurun tanpa adanya hak kepemilikan lahan yang digarapnya. Komoditas pertanian seperti padi, ketela pohon, maupun jagung serta komoditas non pertanian/non sawah yang dihasilkan yaitu seperti mangga, pepaya, sirsak, serai, dsb. Dengan adanya aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kawasan KHDTK tidak menjadikan pengelolaan KHDTK Wanadipa berpusat pada pengelola saja, namun diperlukan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam mengelola KHDTK.

Permasalahan yang sering kali terjadi di dalam hutan kawasan KHDTK secara umum yaitu berupa konflik penguasaan lahan antara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan pengelola kawasan hutan, adanya perubahan kebijakan dari pengelola hutan sebelumnya (Perum Perhutani) dengan pengelola hutan yang baru (Pengelola KHDTK), serta belum tercapainya partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam mengelola KHDTK (Ambayoen, Fibriantingtyas, and Riyanto 2021; Kismartini et al. 2024; Pratama 2019). Berdasarkan beberapa hal tersebut, permasalahan antara pengelola KHDTK dengan masyarakat di sekitar hutan merupakan hal yang sering terjadi mengingat adanya kepentingan dari kedua belah pihak.

Dalam melakukan perencanaan, pendekatan dengan melibatkan masyarakat haruslah terbuka, sehingga dalam melakukan perencanaan dapat mengkombinasikan metode *top down* serta *bottom up*. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat lokal merupakan pihak-pihak yang secara langsung akan terkena dampak bagi kebijakan pengelolaan kawasan (Setiyono, Sarwono, and Hermawan 2012). Adapun pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* telah diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan pantai Karang Tirta, Kabupaten Pangandaran menjadi kawasan wisata Mangrove (Situmorang and Noviana 2023). Berdasarkan Ardiyansyah & Afitah, (2021), dalam melakukan pelibatan masyarakat terhadap pengelolaan KHDTK perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti kebutuhan, aspirasi, maupun pengalaman masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, maka arah pengelolaan KHDTK diharapkan dapat tepat sasaran, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

SEKOLAH PASCASARJANA

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi tegakan pada KHDTK Wanadipa?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KHDTK Wanadipa?
3. Bagaimana strategi partisipasi masyarakat yang tepat di dalam pengelolaan KHDTK Wanadipa?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui kondisi tegakan dan potensi simpanan karbon pada seluruh zonasi, termasuk zona rehabilitasi-agroforestri yang merupakan lahan yang digarap oleh pesanggem di KHDTK Wanadipa
2. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KHDTK Wanadipa
3. Merumuskan strategi pengelolaan KHDTK Wanadipa berbasis partisipasi masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi kawasan hutan yang terdapat di dalam KHDTK Wanadipa serta bentuk pengelolaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar KHDTK.

SEKOLAH PASCASARJANA

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengelola KHDTK

Dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelibatan masyarakat dalam program kegiatan pengelolaan KHDTK Wanadipa

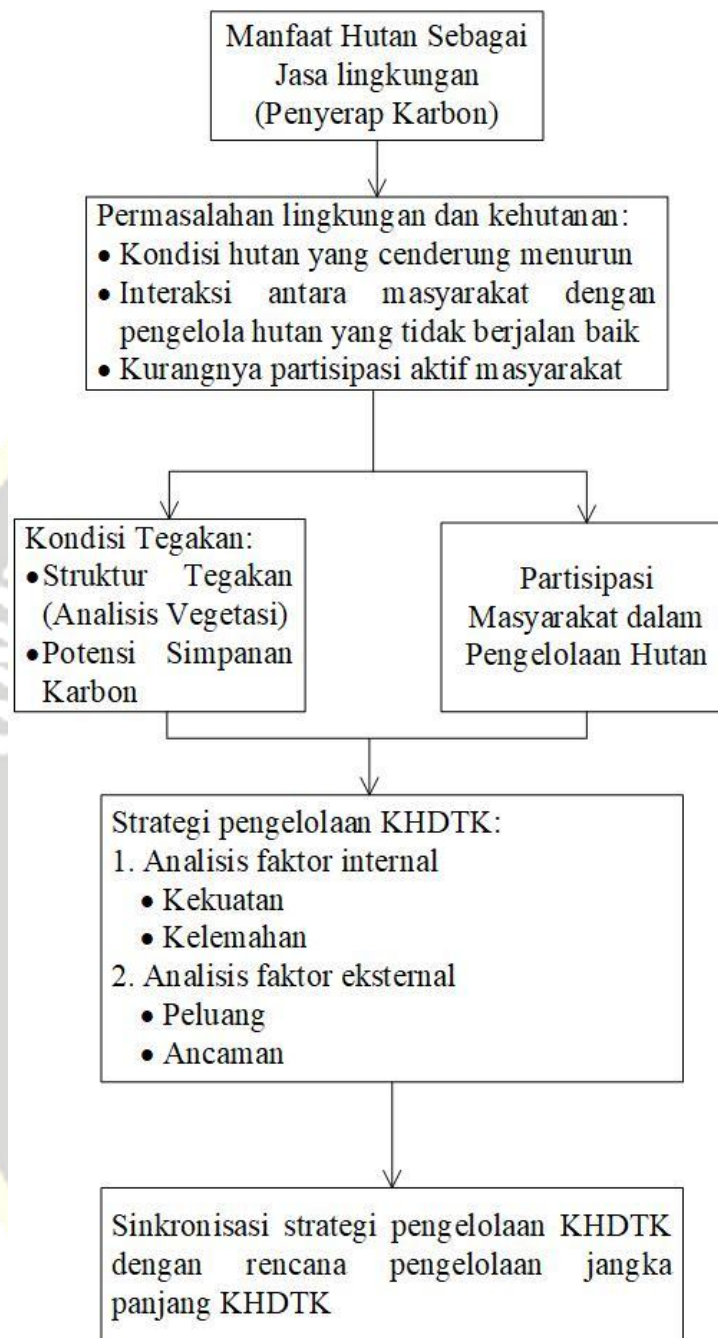
2. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat terkait pentingnya nilai simpanan karbon di dalam hutan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga maupun meningkatkan nilai simpanan karbon, sehingga diharapkan masyarakat yang berprofesi sebagai pesanggem di dalam kawasan KHDTK secara langsung maupun tidak langsung dapat turut menjaga fungsi kawasan hutan.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat digambarkan bentuk kerangka pikir penelitian yang ditunjukkan pada gambar berikut.

SEKOLAH PASCASARJANA



Gambar 1.1.Bagan Alir Kerangka Pikir Penelitian

1.6. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa referensi berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan topik penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Judul	Tujuan	Hasil
Purwanto, R.S., Rohman, Ahmad, M., Teguh, Y., Dwiko B. P. dan Makmun, S 2012 Potensi Biomassa dan Simpanan Karbon Jenis-Jenis Tanaman Berkayu di Hutan Rakyat Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Mengetahui jenis-jenis tanaman berkayu mulai dari tingkat tiang di hutan rakyat Desa Nglanggeran 2. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan tanaman berkayu pada diameter batang setinggi dada, tinggi, kerapatan dan luas bidang dasarnya 3. Untuk mengetahui nilai biomassa dan karbon	Berdasarkan hasil analisis, di Hutan Rakyat Desa Nglanggeran terdapat 25 jenis tanaman berkayu yang ditanam oleh masyarakat, rerata diameter batang setinggi dada 17,27,3 cm. Jumlah per hektar sejumlah 162 pohon yang didominasi oleh jenis Mahoni (67 pohon/ha), rerata simpanan biomassa yaitu sebesar 38,106 ton/ha, serta simpanan karbon yaitu sebesar 19,053 ton/ha
Kismartini, Hardi, W., Jafron, W. H., Bambang, P., Irfan, M. Y., Mohammad, N.H. 2024 Deliberative Governance Principles in Forest Areas Management with Special Purposes	Untuk mengetahui apakah pengelolaan KHDTK Wanadipa Undip telah berlandaskan pada konsep tata kelola yang deliberatif dengan mengkaji pada tiga aspek yaitu representasi, partisipatif, dan proses musyawarah	Pengelolaan KHDTK Wanadipa Undip berdasarkan aspek representasi, partisipatif, dan proses musyawarah belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan komunikasi yang intensif antara pengelola KHDTK dan kelompok tani pesanggem yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan KHDTK serta pada memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Pratama, A. A. 2019 Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forests Status in ex-Perhutani Forest Area	Untuk mengidentifikasi kebijakan dari konsep perhutanan sosial di masa lampai dan merumuskan konsep yang tepat pada kebijakan KHDTK Getas-Ngandong	Kebijakan pengelolaan hutan sebelum adanya KHDTK Getas-Ngandong tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan. Perhutanan sosial dari PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan karena tidak menempatkan masyarakat sebagai mitra yang setara sebagaimana konsep dari perhutanan sosial.

Judul	Tujuan	Hasil
Ambayoen, M. A., Alia, F., Sugeng, R. 2021 Persespsi Masyarakat Magersaren Terhadap Kelestarian Hutan di UB Forest	1. Mendeskripsikan pengelolaan hutan penelitian dan pendidikan di UB Forest 2. Mengidentifikasi persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi dan manfaat hutan di UB Forest 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat	Pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan di UB Forest diarahkan menjadi hutan lindung dan hutan peroduksi. Secara umum persepsi masyarakat terkait fungsi hutan UB baik dari fungsi lindung maupun produksi telah memahami serta menjalankan sesuai dengan ketentuan, namun terdapat masyarakat yang merasa keberatan terkait dengan perubahan kebijakan terkait kewajiban menyadap getah pinus. Adapun faktor internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terdiri dari kemampuan SDM, kemampuan finansial, serta kepemilikan lahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebutuhan tenaga kerja pengelola UB Forest serta amanat UU Kehutanan terkait partisipasi masyarakat sekitar hutan.
Ardiyansyah, Purnama dan Ise, A. 2021 Motivasi Masyarakat terhadap Pengelolaan KHDTK Mungku Baru, Palangka Raya	Untuk mengetahui hubungan motivasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KHDTK Mungku Baru	Tingkat motivasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KHDTK Mungku Baru masuk dalam kategori rendah dengan faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat yaitu jumlah keluarga, pendidikan, pekerjaan dan penyuluhan
Prawestya Tunggul Damayanti 2011 Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat	1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani di Desa Bodeh, Kecamatan Rendublatung, Kabupaten Blora	Pelaksanaan PHBM di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang telah dilakukan perhutani yaitu dengan cara bermitra dengan masyarakat. Adapun bentuk kemitraan yang dilakukan yaitu terbagi menjadi kegiatan yang berbasis lahan dan bukan lahan. Kegiatan berbasis lahan yaitu

Judul	Tujuan	Hasil
	2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani maupun masyarakat dalam implementasi sistem PHBM	berupa kegiatan penyiapan lahan pada saat akan memasuki musim tanam dari Perhutani. Sedangkan kegiatan bukan lahan yaitu berupa kegiatan pengamanan tegakan dari adanya ancaman pencurian. Selain itu terdapat sistem bagi hasil bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi pada program PHBM yaitu masyarakat memperoleh 25% dari hasil produksi kayu yang dipanen. Kendala yang sering dijumpai yaitu dari faktor alam seperti hujan dengan intensitas tinggi, kebakaran lahan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun pembakaran yang disengaja.
Kiolol, Natalia., Tilaar, Wenny., Rotinsulu, Wiske 2017 Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Ambong Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara	1. Menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove 2. Menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Desa Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove Desa Kampung Ambong yaitu berupa faktor tingkat pendidikan dan keanggotaan dalam organisasi. Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat yang telah dilakukan yaitu dengan melibatkan Kelompok Tani Hutan Tanjung Asa dimana dalam pengelolaannya berdasarkan atas 2 konsep utama, yaitu perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove. Konsep perlindungan yaitu dengan menetapkan suatu kawasan hutan mangrove yang dijadikan sebagai sabuk hijau baik di sepanjang pantai maupun tepi sungai. Sedangkan konsep rehabilitasi yaitu berupa kegiatan pemulihan kondisi hutan

Judul	Tujuan	Hasil
		mangrove baik dalam bentuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pengawasan.
Witno., Maria dan Supandi, D. 2020 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa di Kelurahan Battang Kota Palopo	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat sekitar hutan terhadap keberadaan Hutan Kemasyarakatan	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm Tandung Billa ditinjau dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan tergolong tinggi, sedangkan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi masih tergolong rendah. Adapun faktor yang berperan dalam kurangnya partisipasi masyarakat yaitu faktor keterampilan, pengalaman dan kesempatan anggota dalam pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki tingkat kebaruan, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KHDTK. Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat pada umumnya masih menggunakan skema perhutanan sosial yang berlokasi di Hutan Desa, Hutan kemasyarakatan, maupun Hutan Tanaman Rakyat. Sedangkan KHDTK Wanadipa merupakan KHDTK yang belum lama ditetapkan, sehingga terkait dengan implementasi pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat masih belum diteliti. Adapun penelitian yang telah dilakukan di KHDTK Wanadipa telah dilakukan oleh Kismartini et al. (2024), dimana pada penelitian tersebut berfokus pada tinjauan pengelolaan KHDTK Wanadipa Undip berdasarkan aspek representasi, partisipatif, dan proses musyawarah.

Adapun kaitannya dengan simpanan karbon yaitu salah satu fungsi kawasan hutan yaitu memiliki fungsi sebagai jasa lingkungan. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya berfokus pada besaran nilai simpanan karbon pada

lokasi yang diteliti, namun belum terdapat perumusan strategi bagaimana cara meningkatkan potensi simpanan karbon tersebut. Selain itu, guna meningkatkan potensi simpanan karbon tersebut, selain diperlukan upaya oleh pengelola/stakeholder terkait, juga diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Hal ini diperlukan mengingat masyarakat sekitar sebagai pihak pertama yang nantinya akan menerima manfaat hutan sebagai jasa lingkungan tersebut.



SEKOLAH PASCASARJANA